

JENIS PERIJINAN DAN NON PERIJINAN YANG DI LAYANI PTSP

Sesuai dengan Perda No.7 /2011 dan Peraturan Gubernur No.25 /2012

No	Bidang	Jenis Pelayanan		
		Perizinan		Non Perizinan
1	2	3		
1.	Penanaman Modal	1.	Izin Prinsip Penanaman Modal Baru	
		2.	Izin Perinsip Perluasan	
		3.	Izin Usaha	
		4.	Izin Usaha Perluasan	
		5.	Izin Perubahan	
			a. Perubahan Pemegang Saham	
			b. Perubahan Bidang Usaha	
			c. Perubahan Alamat Perusahaan	
			d. Perubahan Nama Perusahaan	
			e. Perubahan Rencana Penyelesaian Proyek	
			f. Penyelesaian Proyek	
			g. Perubahan Nilai Investasi	
			h. Perubahan Kapasitas Produksi	
		7.	Izin Usaha Penggabungan (merger)	
		8.	Izin Usaha Diluar Kawasan Industri	
		9.	Izin Usaha di Dalam Kawasan Industri untuk Penanaman Modal Dalam Negeri	

2.	Perindustrian dan Perdagangan	1.	Izin usaha Industri dengan skala investasi di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan menteri		
		2.	izin perluasan industri dengan skala investasi di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan menteri		
3.	kebudayaan dan Pariwisata			1.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
				2.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Penyedia Akomodasi
				3.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
				4.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata
				5.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
				6.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Daya Tarik Wisata
				7.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
				8.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
				9.	Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Intensif, Konfrensi dan Pameran

				10.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
				11.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
				12.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
				13.	Rekomendasi Pendaftaran Usaha Spa
4.	Pendidikan			1.	Rekomendasi Pendirian dan Penutupan Perguruan Tinggi
5.	Koperasi			1.	Rekomendasi pengesahan akta perndirian koperasi
				2.	Rekomendasi Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi
				3.	Rekomendasi pembubaran koperasi
				4.	Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi
6.	Tenaga Kerja	1.	Perpanjangan Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Lintas Kab/Kota		
7.	Pertambangan dan Energi	1.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi untuk mineral non logam dan bantuan lintas Kab/Kota	1.	Rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak
		2.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi mineral non logam dan bantuan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan		
		3.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengangkutan mineral dan batubara lintas Kab/Kota		
		4.	Izin Pengangkutan/Penimbunan dan pemakaian bahan peledak (izin gudang handak)		

		5.	Ksrtu izin meledakkan (KIM)		
		6.	Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas Kab/Kota		
8.	Kesehatan	1.	Izin bidan;	1.	Rekomendasi izin Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT)
		2.	Izin perawat;	2.	Rekomendasi izin usaha Industri Obat Tradisional (IOT)
		3.	Izin perawat gigi (SIPG);	3.	Rekomendasi izin Produksi Kosmetika
		4.	Izin Fisioterapis (SIF);	4.	Rekomendasi sertifikat produksi alat kesehatan (ALKES)
		5.	Izin Refraksionis Optisien (SIRO)	5.	Rekomendasi sertifikat prosduksi perbekalan kesehatan rumah tangga
		6.	Izin Asisten Apoteker (SIAA);	6.	Rekomendasi Izin pedagang besar farmasi (PBF) pusat
		7.	Izin Terapis Wicara (SITW);	7.	Rekomendasi izin pedagang besar bahan baku farmasi penyalur (PBBBBF)
		8.	Izin Radiografer (SIR);	8.	Rekomendasi izin penyalur alat kesehatab (IPAK)
		9.	Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);		
		10.	Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Non pendidikan.		
		11.	Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non pendidikan;		
		12.	Izin Perpanjangan penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan;		
		13.	Izin Pendirian RS khusus pemerintah kelas B.		
		14.	Izin Penyelenggaraan RS khusus pemerintah kelas B;		
		15.	Izin perpanjangan Penyelenggaraan RS khusus pemerintah kelas B;		

		16.	Izin pendirian RSU Swasta kelas B;		
		17.	Izin Penyelenggaraan RSU Swasta kelas B.		
		18.	Izin perpanjangan penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B;		
		19.	Izin Pendirian RS khusus swasta kelas B;		
		20.	Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas B;		
		21.	Izin perpanjangan Penyelenggaraan RS khusus swasta kelas B;		
		22.	Izin perpanjangan Penyelenggaraan RS khusus swasta kelas B;		
		23.	Izin Pedagang Besar Farmasi cabang (PBF Cab);		
		24.	Izin Cabang Penyalur Kesehatan.		
9.	Pertanian dan Peternakan	1.	Izin usaha distributor obat hewan		
10.	Kehutanan dan Perkebunan	1.	Izin industri penggergajian	1.	Perluasan lahan
		2.	Izin industri serpih kayu (wood chip)	2.	Perubahan jenis tanaman
		3.	Izin industri vinir (veneer)	3.	Penambahan kapasitas
		4.	Izin industri kayu lapis (plywood)	4.	Discersifikasi usaha
		5.	laminated veneer lumber (LVL)	5.	Tempat penampungan kayu terdaftar (TPT)
		6.	Industri Hasil Hutan Bukan Kayu	6.	Rekomendasi (pertimbangan ternis) dalam rangka tukar menukar kawasan hutan
		7.	Izin perluasan industri primer hasil hutan kayu	7.	Rekomendasi (pertimbangan ternis) dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan

		8.	peremajaan mesin (reengineering)		
		9.	Usaha budidaya tanaman perkebunan		
		10.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan		
		11.	Usaha bididaya dan industri penolahan hasil pekebunan		
11	Sosial			1.	Rekomendasi pengumpulan uang atau barang
				2.	Rekomendasi undian gratis hadiah
				3.	Rekomendasi pengumpulan uang/barang
				4.	Rekomendasi tanda pendaftaran organisasi sosial/yayasan/LSMUKS
12.	SDA dan Pemukiman	1.	Izin pengelolaan kawasan sumber air		
13.	Binamarga dan Tata Ruang	1.	Izin pemakaian tanah pada ruang milik jalan		